

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian pada saat bencana alam secara normatif telah tercantum dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencurian sangat banyak terjadi, dan hal ini dapat dilakukan berbagai cara. Kasus bencana alam Kota Palu banyak dijumpai pencurian barang yang mengakibatkan kerugian dari para korban. Kepastian dan keadilan hukum belum jelas dalam melaksanakan pertanggung jawaban kepada korban. Perlindungan hukum terhadap korban masih kurang dan Pasal 363 KUHP kurang efektif. Permasalahan yang penulis teliti yaitu Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana pencurian pada saat bencana alam di Kota Palu di hubungkan dengan Pasal 363 KUHP, Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh korban tindak pidanapencurian pada saat bencana alam di Kota Palu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertitik pada analisis peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum korban tindak pidana pencurian pada saat bencana alam, dengan bahan pustaka yang dijadikan bahan hukum utama yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari norma hukum, kaidah hukum, dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang merupakan buku hukum dan tulisan para ahli. Bahan hukum tersier, bahan yang merupakan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder dan yang lainnya. Tahapan yang dilakukan dalam menyusun penelitian ini dengan tahapan kepustakaan. Data yang didapatkan melalui cara yang berasal dari bahan hukum tersebut lalu kemudian data tersebut disusun dan di analisa melalui metode dekriptif analitis.

Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa, Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian saat bencana alam di kota palu kurang efektif. Pasalnya sebagian besar pelaku penjarahan sama sekali tidak di tindak pidana kan, dibenarkan dengan asas dasar penghapus pidana yang sebetulnya belum seutuhnya memenuhi unsur, yang menyebabkan terjadinya pengesampingan asas *equality before the law*. Upaya perlindungan hukum yang merupakan upaya represif terakhir korban yang bisa dilakukan korban sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan berupa pengajuan gugatan melawan hukum dan upaya pengajuan gugatan ganti rugi, restitusi dan kompensasi dalam hal materiil dan immaterial berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian, Asas *equality before the law*, Bencana Alam

ABSTRACT

Legal protection for victims of theft during a natural disaster is normatively listed in Article 363 of the Criminal Code. Theft is very common, and this can be done in various ways. Cases of natural disasters in Palu City are often found theft of goods which results in losses from the victims. Legal certainty and justice are not yet clear in carrying out accountability to victims. Legal protection for victims is still lacking and Article 363 of the Criminal Code is less effective. The problem that the author has examined is the Legal Protection of victims of criminal acts of theft during natural disasters in Palu City connected with Article 363 of the Criminal Code, efforts that can be made by victims of theft in the event of natural disasters in Palu City.

This study uses a normative juridical approach that focuses on the analysis of laws and regulations concerning legal protection for victims of criminal acts of theft during natural disasters, with library materials used as the main legal material namely primary legal material consisting of legal norms, legal norms, and statutory regulations -invitation. Secondary legal materials which are legal books and writings of experts. Tertiary legal material, material which is a guide and an explanation of primary and secondary law and others. The stages carried out in compiling this research with the literature stage. Data obtained through means derived from these legal materials and then the data is compiled and analyzed through descriptive analytical methods.

The results of the study concluded that, legal protection against victims of theft during a natural disaster in the city of hammer is less effective. The reason is that most of the perpetrators of looting are not at all criminal right, justified by the basic principles of criminal eradication that actually have not fully met the elements, which led to the overriding of the principle of equality before the law. Legal protection efforts, which are the last repressive measures that victims can do, have already been set out in legislation in the form of filing lawsuits against the law and efforts to file compensation claims, restitution and compensation in material and immaterial terms based on applicable terms and conditions.

Keywords: Theft Crime, The principle of equality before the law, Natural Disasters